

**PESAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM INSTAGRAM
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG**

(TESIS)

Oleh

**AULIA FITRI KHAIRINA
(2126031016)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

**PESAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM INSTAGRAM
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AULIA FITRI KHAIRINA

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

Pada

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Pesan Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung

Oleh

Aulia Fitri Khairina

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan strategi kerja-kerja yang mumpuni sebagai upaya mewujudkan visi misinya yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Bawaslu membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan maupun pengawasan pemilu. Jenis media sosial yang digunakan disesuaikan dengan segmen kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan yang akan berpartisipasi, salah satunya adalah Instagram yang merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi politik penyebaran informasi kepemiluan. Instagram dapat dianggap sebagai contoh utama dari new media dalam konteks komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan metode analisis isi (content analysis) bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya yang dianggap sebagai media yang mampu menyebarkan pesan-pesan komunikasi politik. Dalam analisis akun Instagram @bawaslukotabandarlampung, ditemukan unggahan-unggahan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang berisikan pesan-pesan komunikasi politik yang proses penyampaian informasi politik Bawaslu tersebut di Instagram melalui tahapan reportase, editorial, komentar, analisis, jurnalistik dan akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil dalam menyusun, menganalisis, dan menyajikan informasi politik kepada masyarakat melalui platform media sosial tersebut. Akun @bawaslukotabandarlampung mengklasifikasikan pesan-pesan politiknya dalam beberapa tema sentral yang digunakan yaitu tema pesan pengawasan pemilu, informasi pemilu dan pendidikan pemilu yang ditampilkan dalam postingan feeds Instagram tersebut.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Instagram, Bawaslu Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

Political Communication Messages on Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung

By

Aulia Fitri Khairina

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) as an institution that has the mandate to oversee the election process requires a qualified work strategy in an effort to realize its vision and mission, namely the upholding of the integrity of the organizers, administration and election results. Bawaslu needs social media in order to maximally carry out the mandate given by the law to increase public participation in both elections and election supervision. The type of social media used is adjusted to the segment of the community group to be reached and who will participate, one of which is Instagram which is a photo and video sharing application that can be used as a political communication tool for disseminating electoral information. Instagram can be considered a prime example of new media in the context of political communication. This study aims to analyze and describe how Bawaslu Bandar Lampung uses Instagram as a political communication tool. This research uses a qualitative approach with the help of descriptive content analysis methods. The results showed that the Bandar Lampung City Bawaslu used Instagram as a political communication tool which was considered a medium capable of spreading political communication messages. In the analysis of the @bawaslukotabandarlampung Instagram account, it was found that the uploads of the Bandar Lampung City Bawaslu contained political communication messages whose process of delivering Bawaslu's political information on Instagram went through the stages of reportage, editorial, commentary, analysis, journalism and accountability which can be interpreted as steps taken in compiling, analyzing, and presenting political information to the public through the social media platform. The @bawaslukotabandarlampung account classifies its political messages in several central themes used, namely the theme of election supervision messages, election information and election education displayed in the Instagram feeds post.

Keywords: Political Communication, Instagram, *Bawaslu Kota Bandar Lampung*.

Judul Tesis : **PESAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM
INSTAGRAM BAWASLU KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Aulia Fitri Khairina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126031016**

Program Studi : **Magister Ilmu Komunikasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.
NIP. 196207161988031001


Dr. Nanang Trenggono, M.Si.
NIP. 196212041989021001

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi


Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.
NIP. 196207161988031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.

Sekretaris : Dr. Nanang Trenggono, M.Si.

Penguji Utama : Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 196403281989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 17 Oktober 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Fitri Khairina
NPM : 2126031016
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pesan Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung” tersebut adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya dan telah saya sebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 November 2023

ng membuat pernyataan


Aulia Fitri Khairina
NPM 2126031016

RIWAYAT HIDUP



Aulia Fitri Khairina, lahir di Tanjung Karang pada 11 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Lutfi Al Ajid dan Ibu Eliana Susanti. Peneliti mengenyam sekolah dasar di SDN 050648 Bandar Muda, Kec. Bahorok, Sumatera Utara. Mengenyam sekolah menengah pertama di MTs Guppi Natar, Kec. Natar. Mengenyam sekolah menengah atas di SMK Yadika Natar, Kec. Natar, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Lampung pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada tahun 2021, peneliti berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom). Setelah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), peneliti bekerja di Panwaslu Kecamatan Bumi Waras yang merupakan panitia pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pasca menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1), peneliti kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) di Universitas Lampung dengan memilih Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat
(balasan)nya." (Q.S Al-Zalzalah: 7)

"Kamu harus menjadi penggemar terbesar dirimu sendiri, karena dunia sangat hebat
untuk membuatmu terjatuh."

(Garyvee)

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini dipersembahkan kepada:
Ibundaku Tercinta Ibu Eliana Susanti dan Ayahandaku Tercinta Bapak Lutfi Al Ajid
Serta Adikku Tersayang Alfairizi Ramadhan

Terimakasih atas dukungan, motivasi, kesabaran dan do'a yang selalu tersemat sehingga penulis dapat mencapai keberhasilan ini.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan kehendak-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pesan Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung” ini dengan baik. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras, bimbingan dan ridho dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Melalui kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril maupun spiritual. Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si., selaku Pembahas sekaligus Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
7. Ibu Dr. Nina Yudha Aryanti, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung

yang senantiasa meluangkan waktunya membantu dan membimbing selama masa perkuliahan berjalan;

8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Ilmu Komunikasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat;
9. Mbak Febri dan Mbak Vivi selaku Staff di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang senantiasa dengan keikhlasan hati membantu berbagai proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung;
10. Jajaran Pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah mendukung, mengizinkan dan memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian ini;
11. Bapak Prof. Dr. H. Sudarman, MA selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Ayahanda yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya selama penulis menempuh pendidikan;
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Lampung angkatan 2021 yang senantiasa saling mendukung dan memberi semangat dari awal kuliah hingga akhir;
13. Power Rangers Team, Nadiya Hasna Amrina, S.Pd., Olya Kartika, S.Sos., Viola Amiswari, S.Pd., Nadila Mirza Azzuhurf, S.Sos., Adellia Ayu Paramitha, S.Pd., yang selalu mendukung dan sangat terlibat dalam berjalannya proses pendidikan yang penulis jalani hingga sampai di titik ini.
14. Diah Ayu Nabilah Karimah, S.I.Kom dan Rika Khusnul Hasanah, S.Sos, selaku teman seperjuangan, senang dan sedih dilalui bersama demi menyelesaikan pendidikan ini;
15. Tim Kebanyakan Grup; Mba Siti Sarohmawati, S.I.Kom., Hariz A'Rifai, S.Pd., Zaka Maulana Hasan, S.I.Kom., yang turut menemani proses penelitian ini.
16. Teman seperjuangan di S1, Indah Perwita Sari, S.I.Kom, Wiwi Winda Sari, S.I.Kom, Lifia Lulu Rengganis, S.I.Kom yang selalu mendukung dan memberikan semangat;
17. Keluarga besar Panwaslu Kecamatan Bumi Waras, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasinya;

18. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Lampung, yang telah memberikan dukungan selama ini secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;
19. Keluarga besar Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Lampung, yang telah memberikan dukungan selama ini secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengharapkan adanya saran, masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, paling tidak, bagi diri penulis sendiri.

Bandar Lampung, 2023

Aulia Fitri Khairina

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Pikir.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori.....	18
2.2.1. Pemilihan Umum.....	19
2.2.2. Badan Pengawas Pemilu.....	20
2.2.3. Komunikasi Politik.....	22
2.2.4 Instagram.....	26
2.2.5. <i>Media Richness Theory</i>	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Paradigma Penelitian.....	30
3.2. Metode Penelitian.....	33
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Lokasi Penelitian.....	34
3.5. Unit Analisis.....	35
3.6. Sumber Data.....	35
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.8. Teknik Analisis Data.....	36
3.9. Validitas Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	40
4.2. Hasil dan Analisis Penelitian.....	44
4.2.1. Instagram Sebagai Media Publikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	44
4.2.2. Organisasi Politik dan Masyarakat Sebagai Komunikan.....	53

4.2.3. Kecepatan Instagram Bawaslu Menghantarkan Umpan Balik.....	57
4.2.4. Kapasitas Komunikasi Verbal dan Non Verbal Instagram Bawaslu.....	58
4.2.5. Kemampuan Penggunaan Bahasa Instagram Bawaslu.....	62
4.2.6. Kemampuan Instagram Bawaslu Menghantarkan Perasaan Personal.....	63
4.3. Pembahasan.....	63
4.3.1. Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung	63
4.3.2. Kapasitas Media Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung	68
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Subjek Pelapor Pelanggaran Pemilu.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 1.3 Tabel Analisis.....	38
Tabel 1.4 Tabel Kategorisasi.....	39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet Indonesia.....	6
Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir.....	9
Gambar 2.1 Model Komunikasi Politik Mcnair.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	41
Gambar 4.2 Akun Instagram @bawaslukotabandarlampung.....	45
Gambar 4.3 Feed Instagram Bawaslu Bulan Januari 2023.....	46
Gambar 4.4 Feed Instagram Bawaslu Bulan Februari 2023.....	46
Gambar 4.5 Feed Instagram Bawaslu Bulan Maret 2023.....	47
Gambar 4.6 Feed Instagram Bawaslu Bulan April 2023.....	47
Gambar 4.7 Feed Instagram Bawaslu Bulan Mei 2023.....	48
Gambar 4.8 Feed Instagram Bawaslu Bulan Juni 2023.....	48
Gambar 4.9 Feed Instagram Bawaslu Bulan Juli 2023.....	48
Gambar 4.10 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung 24 Januari 2023.....	50
Gambar 4.11 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung 2 Januari 2023.....	51
Gambar 4.12 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung 24 Februari 2023.....	51
Gambar 4.13 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung 22 Februari 2023.....	52
Gambar 4.14 Unggahan akun @bawaslukotabandarlampung 2023.....	54
Gambar 4.15 Unggahan akun @bawaslukotabandarlampung 2023.....	55
Gambar 4.16 Feeds Akun @bawaslukotabandarlampung.....	58
Gambar 4.17 Feeds Akun @bawaslukotabandarlampung.....	59
Gambar 4.18 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung.....	60
Gambar 4.19 Unggahan Akun @bawaslukotabandarlampung.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu memerlukan strategi kerja yang efektif untuk mencapai visi dan misinya, yaitu menjaga integritas penyelenggara, pelaksanaan, dan hasil pemilu. Pemilu merupakan salah satu alat penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, dan penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi. Morissan (2005) mengartikan pemilu sebagai suatu cara atau sarana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami keinginan masyarakat suatu negara terhadap kebijakan dan pedoman negara serta merupakan bentuk penyelenggaraan sistem demokrasi yang efektif.

Dalam strategi yang dirancangnya, Bawaslu berpendapat bahwa teknologi informasi berperan penting dalam menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan pemilu, karena teknologi membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu demi kebaikan bersama dan menciptakan ruang pemilu yang terbuka. Transmisi ide, konsep, dan pengaruh sudah tidak lagi lazim dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat kini lebih mengapresiasi komunikasi virtual (online). Masyarakat dari semua kelas ekonomi kini memiliki akses ke Internet. Oleh karena itu, penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat adalah sebuah keharusan. Untuk itu, tugas Bawaslu harus mampu membaca kebutuhan zaman. Memaksimalkan penggunaan media sosial adalah sebuah keniscayaan. Pemanfaatan media sosial dimaksudkan untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan pemantau pemilu di semua kalangan dan golongan. Dalam hal ini Bawaslu telah mengeluarkan kebijakan melalui Modul Pedoman Pengelolaan Media Sosial yang diterbitkan sebagai pedoman bagi jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Memaksimalkan fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan Bawaslu untuk menyampaikan pesan politiknya dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi pemilu serta pengawasan pemilu partisipatif. Partisipasi politik merupakan wujud kedaulatan rakyat yang merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya pemerintahan yang baik. Tentu saja peran serta seluruh warga negara sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang baik demi kemajuan dan pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi pemilih baru pendukung pemerintah adalah partisipasi politik.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemantauan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pemantauan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat. Sebelum meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai politik. Faktanya, kesadaran masyarakat terhadap kedaulatan proses demokrasi masih lemah. Rendahnya kesadaran tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, pemilu, dan pemantauan pemilu. Faktanya, semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang dicapai melalui partisipasi dalam proses politik, semakin sah pula proses pemilu dan hasil-hasilnya.

Secara empiris, kriteria keberhasilan suatu pemilu dapat diukur melalui dua variabel, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan dapat diukur dari jumlah atau proporsi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari segi kualitatif, hal ini juga terlihat dari peran aktif pemilih di setiap tahapan dan kewajaran pilihannya. Pada hakikatnya suatu pemilu dikatakan berhasil bila dilaksanakan secara damai, tanpa kekerasan, ancaman, atau intimidasi sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang, serta dilaksanakan dengan lancar dan adil. Jika dari segi proses standar normatif tersebut terpenuhi, maka otomatis dapat mendorong motivasi dan semangat partisipasi masyarakat karena kepercayaan sudah terjalin.

Sama halnya dengan pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan partisipatif mengacu pada pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara atau masyarakat dalam kegiatan politik. Menurut Bidja (2022), konteks pengawasan pemilu mempunyai partisipasi yang jelas pada tingkat komunitas atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Komunitas atau kelompok masyarakat yang terlibat dapat mendukung atau kemudian menjadi penggugat dalam proses dan hasil pemilu. Urgensi pengawasan dengan partisipasi masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, sehingga mendorong perluasan cakupan pemantauan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan kursi, hal ini juga perlu diimbangi dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Jika pemilu diselenggarakan tanpa pengawasan, maka akan terjadi manipulasi suara, pencabutan hak pilih, kebijakan moneter, pelanggaran aturan pemilu yang berujung pada tuntutan hukum, biaya politik yang tinggi, suara ganda dan konflik antar pendukung kandidat. Untuk menghindari hal tersebut, penyelenggara pemilu harus memantau pelaksanaan proses pemilu yang dapat diakses oleh masyarakat sepanjang pemilu. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan cara mendorong secara aktif peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, dengan menyiapkan sarana atau sarana bagi masyarakat. untuk dengan mudah menyampaikan informasi, pengaduan, dan pengaduan tentang pelanggaran pemilu.

Pada Pemilu 2019, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi semuanya dijerat dengan pelanggaran pidana. Kota Bandar Lampung sendiri menangani jenis-jenis pelanggaran yang sering muncul, khususnya pelanggaran pidana, netralitas ASN, dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana dan netralitas ASN merupakan pelanggaran yang berulang di setiap pemilu. Dengan meluasnya pencegahan pelanggaran dan peningkatan

kesadaran secara luas, hal ini tidak dapat dikatakan efektif tanpa menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga. Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran administratif yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan berskala besar. Pelanggaran pemilu adalah suatu bentuk pelanggaran hukum pidana yang melibatkan partisipasi dalam suatu kejahatan, termasuk turut serta, menghasut, memerintahkan melakukan kejahatan, atau membantu melakukan kejahatan. Terkait pelanggaran pidana, terdapat pusat gacumdu yang bertugas menangani laporan pelanggaran dan hasil penelitian dugaan pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan atau janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Penanganan dugaan pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan maupun laporan dan hasil dugaan pelanggaran berbeda dengan temuan, laporan dugaan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih yang bertindak sebagai pelapor dalam menyampaikan laporan.

No	Subjek Pelapor	n	%
1.	Peserta Pemilu	2	6%
3.	Tim Kampanye	0	0
4.	Masyarakat Mempunyai Hak Pilih	4	13%
5.	Pengawas Pemilu	7	81%

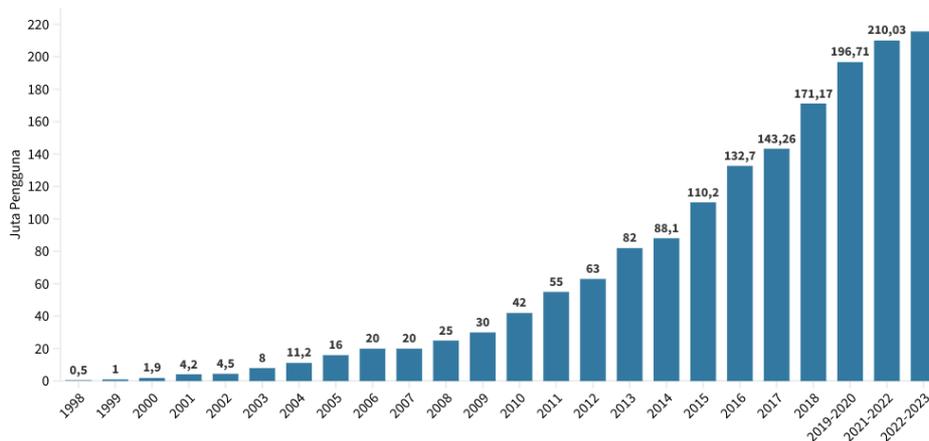
Tabel 1.1 Subjek Pelapor Pelanggaran Pemilu
Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang bersumber dari Bawaslu Kota Bandar Lampung terdapat persentase subjek pelapor pelanggaran pemilu pada tahun 2019, yakni pelapor dari peserta pemilu sebanyak 6%, masyarakat yang mempunyai hak pilih 13% dan pengawas pemilu sebanyak 81%. Dengan persentase tersebut dapat

disimpulkan tingkat laporan masyarakat tidak begitu tinggi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melapor kecurangan yang terjadi artinya memperlihatkan bahwa pengawasan partisipasi masyarakat juga begitu rendah yang menyebabkan rendahnya persentase pelaporan dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemilu demokratis, Undang Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat tersebut, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat. Penggunaan internet untuk kegiatan politik kini semakin marak di Indonesia. Setidaknya ada dua faktor yang membuat hal ini bisa terjadi. Pertama, adalah sistem politik di Indonesia yang semakin demokratis. Pasca reformasi, berkembangnya pers, serta kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat kian meningkat. Alhasil, siapapun di era reformasi ini bebas untuk menggunakan dunia maya sebagai artikulasi gagasan, ide, pemikiran, bahkan tuntutan dan tekanan kepada pemerintah atau penguasa. Kondisi ini melahirkan sebuah ruang publik yang berada di dalam dunia maya. Penguatan demokrasi terjadi tidak secara offline, namun di ruang siber. Media sosial dipilih karena masyarakat dari semua kelas ekonomi kini terakses dengan internet yang menjadi sumber utama sebuah media sosial berjalan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan.

Terlebih data pengguna internet berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.



Gambar 1.1 Data Pengguna Internet Indonesia
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan. Bawaslu membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan maupun pengawasan pemilu. Jenis media sosial yang digunakan disesuaikan dengan segmen kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan yang akan berpartisipasi, salah satunya adalah Instagram yang merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi politik penyebaran informasi ke pemilu. Instagram dapat dianggap sebagai contoh utama dari new media dalam konteks komunikasi politik. Sebagai platform media sosial yang berfokus pada berbagi foto dan video, Instagram telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara komunikasi politik dilakukan di era digital. Media sosial memungkinkan partisipasi publik yang diperluas dalam produksi dan distribusi konten. Pengguna dapat secara aktif terlibat dalam pembuatan konten, berbagi informasi, dan berkontribusi pada dialog yang sedang berlangsung.

Dalam hal ini Bawaslu khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung juga turut merancang strategi komunikasi politiknya menggunakan media sosial instagram sebagai media yang dianggap mampu menyampaikan maksud dan tujuan atas pesan yang dibagikannya guna meningkatkan integritas pengawasan pemilu dan mendorong partisipatif publik dalam pemilu dengan memanfaatkan media sosial instagram.

Instagram telah menjadi platform yang penting bagi lembaga seperti Bawaslu dalam meningkatkan integritas pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan memanfaatkan kekuatan visual, interaktivitas, dan keterlibatan pengguna, Instagram memungkinkan Bawaslu untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka secara efektif kepada masyarakat. Instagram dapat digunakan sebagai platform untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu, proses verifikasi, dan pentingnya melaporkan pelanggaran. Dengan menyampaikan informasi secara terbuka dan edukatif, Bawaslu dapat memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya peran mereka dalam memastikan integritas pemilu.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung?. Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pesan Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung” Penelitian ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan penggunaan instagram sebagai alat komunikasi politik Bawaslu dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya?
2. Bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya.
2. Bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung.

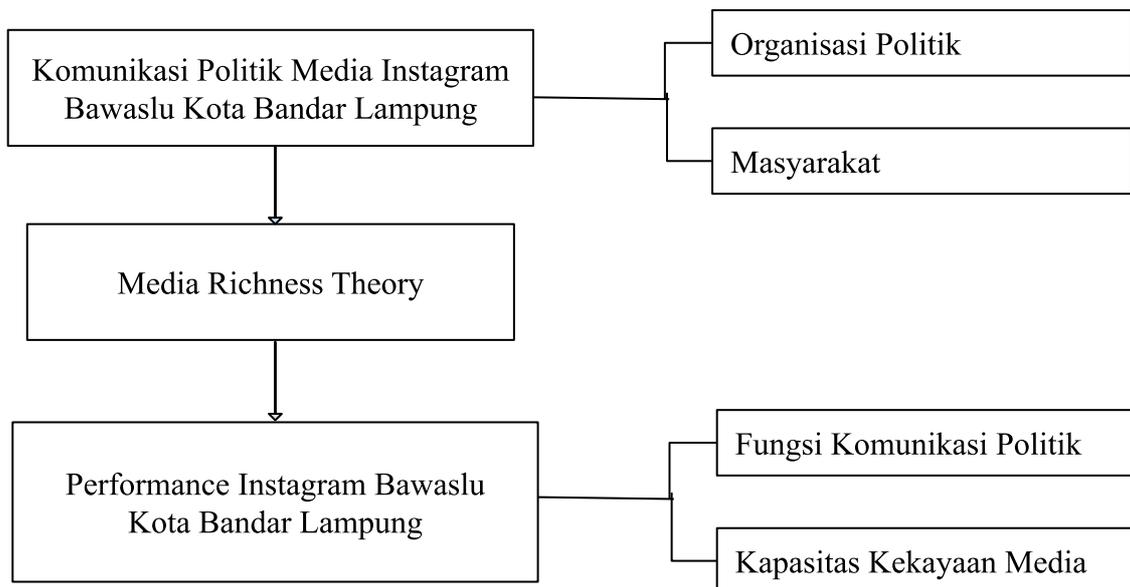
1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

- a. Manfaat Teoritis :
 1. Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan dalam bidang ilmu komunikasi.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis :
 1. Bagi Peneliti untuk memperluas wawasan (pengetahuan) dan cakrawala berpikir penulis dalam kajian ilmiah serta untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 2. Bagi Civitas Akademik Penelitian ini berguna sebagai informasi dan literatur penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian sejenis.

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian, agar peneliti dapat fokus dan tidak melenceng jauh dari permasalahan pokok. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung. Untuk dapat mengarahkan peneliti pada pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan media richness theory dan teori komunikasi politik untuk melihat dan menganalisis bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung.



Gambar 1.2. Bagan Kerangka Pikir

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dijadikan sebagai sebuah acuan atau gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan referensi peneliti guna mempermudah penelitian yang akan dilakukan terdapat penelitian terdahulu yang peneliti gunakan yaitu pertama penelitian dari Rules Reliansyah Putra dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Kampanye oleh Calon Anggota Legislatif di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif di Kota Yogyakarta Pada Pemilu Tahun 2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota calon anggota legislatif di Yogyakarta pada Pemilu 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivisme dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta digunakan sebagai media untuk mendekati diri calon legislatif dengan masyarakat dan media sosial digunakan sebagai media komunikasi untuk menginformasikan profil, kegiatan calon anggota legislatif dan informasi tentang pemilu. Kampanye di media sosial juga memudahkan masyarakat untuk mengenal caleg karena media sosial memiliki jangkauan yang luas dan mudah digunakan. Pemanfaatan media sosial belum digunakan secara maksimal oleh para calon anggota legislatif karena tidak adanya admin khusus yang mengelola. Informasi yang disampaikan pun kurang karena kesibukan para calon anggota legislatif dalam kegiatan kampanye konvensional sehingga kampanye di media sosial hanya digunakan sebagai pendukung bukan sebagai media utama untuk kampanye. Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni perbedaan objek yang diteliti sangat jauh berbeda dan dalam penelitian

terdahulu ini menganalisis penggunaan media sosial pada aktor politik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis penggunaan media sosial Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Research gap dalam penelitian ini adalah belum digambarkan dengan jelas bagaimana penggunaan media sosial oleh calon legislatif yang diteliti dan belum digambarkan dengan jelas model komunikasi politik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana calon legislatif menyampaikan pesan komunikasi politiknya di media sosial.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Mulkan, Nani Nurani, Donny, Adetya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Komunikasi Politik Kepala Daerah di Media Sosial (Studi pada Akun Facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pesan komunikasi politik yang dimunculkan dan gaya komunikasi politik ketiga kepala daerah pada postingan akun facebook masing-masing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketiga kepala daerah ini sangat aktif menggunakan media sosial facebook, terdapat 2 hingga 3 kali postingan yang dibagikan setiap hari nya. Pesan yang dibagikan diantaranya, kebijakan daerah, fasilitas publik milik daerah, aktivitas bersama dengan tokoh politik dalam dan luar negeri. Masing-masing kepala daerah memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda, Anies Baswedan memiliki Bahasa yang formal dengan narasi yang panjang, Ridwan Kamil menggunakan gaya bahasa non formal dan disertai dengan campuran bahasa khas sunda dan bahasa pantun serta video yang menghibur.

Ganjar Pranowo memiliki gaya komunikasi politik yang khas bahasa masyarakat Jawa dengan narasi yang sederhana dan singkat, namun aktivitas Ganjar Pranowo dikemas dengan video yang diedit dengan durasi yang singkat, lucu, menghibur dan terlihat ada kebersamaan dan hiburan yang dimunculkan. Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu objek penelitian yang berbeda peneliti menggunakan media sosial Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Bawaslu sebagai objek yang diteliti sedangkan pada penelitian ini objek penelitian menggunakan media sosial Facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo untuk melihat

dan menganalisis pesan komunikasi politik yang dimunculkan dan gaya komunikasi politik ketiga kepala daerah pada postingan akun facebook masing-masing. Research gap dalam penelitian ini tidak dimunculkan pengkategorisasian pesan yang dilakukan.

Ketiga penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yohanes, Andrian (2022) yang berjudul “Komunikasi Politik Di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram Mengenai Program Pengendalian Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi”. Mengingat persoalan komunikasi politik pada masa krisis pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi politik pemerintah, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, dan anggota DPR, terkait kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Instagram. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Konten yang dianalisis adalah unggahan Instagram dari para komunikator politik pada periode 1 April 2020 hingga 31 Agustus 2021. Dari analisis isi terhadap 172 unggahan, ditemukan bahwa pemerintah merupakan komunikator politik yang paling aktif membicarakan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Studi ini juga menemukan bahwa frekuensi kemunculan pesan tentang program pengendalian Covid-19 lebih tinggi dibanding program pemulihan ekonomi.

Pembicaraan mengenai kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak) paling banyak muncul dalam komunikasi politik. Sementara itu, pesan mengenai program penerapan 3T (*tracing, testing, treatment*), pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui program pemberian bantuan ditemukan dengan frekuensi kemunculan yang lebih sedikit. Research gap dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya, yang mana dalam penelitian analisis media sosial lebih tepatnya menggunakan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi unggahan akun instagram dan studi kepustakaan guna mencari pijakan analisis dalam menganalisis unggahan akun instagram mengenai program pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Berikut peneliti sajikan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang tersaji pada tabel dibawah ini:

1	Judul	Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Oleh Calon Anggota Legislatif Di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Pada Pemilu Tahun 2019) - 2019
	Penulis	Rules Reliansyah Putra – Tesis - Universitas Islam Indonesia
	Teori	Teori Komunikasi Politik
	Metode Penelitian	Metode dengan paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivisme dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota calon anggota legislatif di Yogyakarta pada Pemilu 2019.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta digunakan sebagai media untuk mendekatkan diri calon legislatif dengan masyarakat dan media sosial digunakan sebagai media komunikasi untuk menginformasikan profil, kegiatan calon anggota legislatif dan informasi tentang pemilu. Kampanye di media sosial juga memudahkan masyarakat untuk mengenal caleg karena media sosial memiliki jangkauan yang luas dan mudah digunakan. Pemanfaatan media sosial belum digunakan secara maksimal oleh para calon anggota legislatif karena tidak adanya admin khusus yang mengelola. Informasi yang disampaikan pun kurang karena kesibukan para calon anggota legislatif dalam kegiatan kampanye konvensional

		sehingga kampanye di media sosial hanya digunakan sebagai pendukung bukan sebagai media utama untuk kampanye.
	Perbedaan Penelitian	Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni perbedaan objek yang diteliti sangat jauh berbeda dan dalam penelitian terdahulu ini menganalisis penggunaan media sosial pada aktor politik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis penggunaan media sosial Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
	<i>Research Gap</i>	<i>Research Gap</i> dalam penelitian ini adalah belum digambarkan dengan jelas bagaimana penggunaan media sosial oleh calon legislatif yang diteliti dan belum digambarkan dengan jelas model komunikasi politik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana calon legislatif menyampaikan pesan komunikasi politiknya di media sosial.
2	Judul	“Komunikasi Politik Kepala Daerah di Media Sosial (Studi pada Akun Facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo)” - 2022
	Penulis	Mulkan, Nani Nurani, Donny, Adetya – Jurnal Potret Pemikiran - Universitas Muhammadiyah Jakarta
	Teori	Teori Komunikasi Politik
	Metode Penelitian	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan metode analisis isi.
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pesan komunikasi politik yang dimunculkan dan gaya komunikasi politik ketiga kepala daerah pada postingan akun facebook masing-masing.

	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketiga kepala daerah ini sangat aktif menggunakan media sosial facebook, terdapat 2 hingga 3 kali postingan yang dibagikan setiap hari nya. Pesan yang dibagikan diantaranya, kebijakan daerah, fasilitas publik milik daerah, aktivitas bersama dengan tokoh politik dalam dan luar negeri. Masing-masing kepala daerah memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda, Anies Baswedan memiliki Bahasa yang formal dengan narasi yang panjang, Ridwan Kamil menggunakan gaya bahasa non formal dan disertai dengan campuran bahasa khas sunda dan bahasa pantun serta video yang menghibur. Ganjar Pranowo memiliki gaya komunikasi politik yang khas bahasa masyarakat Jawa dengan narasi yang sederhana dan singkat, namun aktifitas Ganjar Pranowo dikemas dengan video yang diedit dengan durasi yang singkat, lucu, menghibur dan terlihat ada kebersamaan dan hiburan yang dimunculkan.</p>
	<p>Perbedaan Penelitian</p>	<p>Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu objek penelitian yang berbeda peneliti menggunakan media sosial Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Bawaslu sebagai objek yang diteliti sedangkan pada penelitian ini objek penelitian menggunakan media sosial facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo untuk melihat dan menganalisis pesan komunikasi politik yang dimunculkan dan gaya komunikasi politik ketiga kepala daerah pada postingan akun facebook masing-masing.</p>
	<p><i>Research Gap</i></p>	<p><i>Research Gap</i> dalam penelitian ini tidak dimunculkan pengkategorisasian pesan yang dilakukan</p>

3	Judul	“Komunikasi Politik Di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram Mengenai Program Pengendalian Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi” - 2022
	Penulis	Yohanes, Andrean - Jurnal Studi Komunikasi dan Media - Universitas Katolik Soegijapranata
	Teori	Teori Komunikasi Politik
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan dokumentasi.
	Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi politik pemerintah, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, dan anggota DPR, terkait kebijakan penanganan <i>Covid-19</i> dan pemulihan ekonomi nasional di Instagram.
	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan dari analisis isi terhadap 172 unggahan, ditemukan bahwa pemerintah merupakan komunikator politik yang paling aktif membicarakan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Studi ini juga menemukan bahwa frekuensi kemunculan pesan tentang program pengendalian Covid-19 lebih tinggi dibanding program pemulihan ekonomi. Pembicaraan mengenai kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak) paling banyak muncul dalam komunikasi politik. Sementara itu, pesan mengenai program penerapan 3T (tracing, testing, treatment), pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui program pemberian bantuan ditemukan dengan frekuensi kemunculan yang lebih sedikit.
	Perbedaan Penelitian	Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu objek penelitian yang berbeda peneliti akan melakukan penelitian

		pada akun media sosial Bawaslu Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan unggahan Instagram dari para komunikator politik pada masa pemberlakuan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 3-4 sebagai objek atau konten yang akan diteliti dan dianalisis.
	<i>Research Gap</i>	<i>Research gap</i> dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya, yang mana dalam penelitian analisis media sosial lebih tepatnya menggunakan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi unggahan akun instagram dan studi kepustakaan guna mencari pijakan analisis dalam menganalisis unggahan akun instagram mengenai program pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

Teori-teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan media richness theory dan teori komunikasi politik. Teori-teori ini diduga oleh peneliti mampu mengarahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah penelitian, yang terfokus pada bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan instagram sebagai alat komunikasi politiknya dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan politik pada akun tersebut. Adapun teori-teori tersebut sebagaimana paparan berikut:

2.2.1 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan orang-orang untuk menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk menciptakan negara demokratis di mana para pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pengertian pemilu pada dasarnya adalah pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu sendiri pada dasarnya merupakan lembaga demokrasi, memilih wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPRD, masing-masing bertanggung jawab bekerja sama dengan pemerintah, menentukan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan negara. Meskipun seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, undang-undang pemilu memberlakukan batasan usia untuk berpartisipasi dalam memilih. Demokrasi merupakan konsep umum yang diterapkan di semua negara modern, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara. Salah satu wujud demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana menjamin legalitas dan legitimasi suksesi pemerintahan.

Tujuan Pemilu Menurut Prihatmoko (2003:19) dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi prosedural yang sebenarnya, walaupun demokrasi tidak sama dengan pemilu namun pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, sudah lazim bagi negara-negara yang menyebut dirinya demokratis untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih pejabat publik di sektor legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Veri Junaidi (2009) menyatakan bahwa pemilu dan demokrasi adalah "*qonditio sine qua non*," yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Dalam arti pemilu dipahami sebagai tata cara mencapai demokrasi atau tata cara penyerahan kedaulatan rakyat kepada sejumlah calon untuk menduduki jabatan politik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu di suatu negara merupakan pengalokasian hak politik warga negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan sekaligus merupakan sarana keberhasilan transformasi pemerintahan berdasarkan hukum.

Seperti negara modern, Indonesia berupaya mencapai kedaulatan dan demokrasi kerakyatan dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum, masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan suatu negara. Kehendak rakyat dalam pemilihan umum disampaikan melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih, yang kepadanya rakyat diberi kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

2.2.2 Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat menjadi Bawaslu merupakan lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Serta mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas Putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.

Fungsi pengawasan Bawaslu pada pemilu berdasarkan pada UU ini sebenarnya hampir sama dengan pemantau pemilu, pengamat pemilu, bahkan media. Fungsi pertama, yakni fungsi pengawasan atas pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu, dilaksanakan oleh berbagai unsur organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga pemantau pemilu, media massa, bahkan partai politik. Fungsi kedua, yakni fungsi menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan

administrasi pemilu yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota tanpa perantara. Fungsi ketiga, yakni menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu kepada kepolisian RI. Fungsi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh Polri, seperti yang dilakukan oleh Polri atas pengaduan dugaan pelanggaran jenis tindak pidana lain. Fungsi keempat, yakni menampung gugatan peserta pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat, yang sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara seperti kasus sengketa mengenai peserta pemilu dan daftar calon.

2.2.3 Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai bidang kajian baru pada mulanya berasal dari beberapa studi, seperti studi retorika, analisis propaganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang pendapat publik, studi tentang perilaku pemilih, hubungan pemerintah dengan media, dan studi teknik kampanye. Pada perkembangannya beberapa studi tersebut menyatu sebagai bidang studi komunikasi politik dengan dilengkapi dengan teori-teori kontemporer serta analisis yang lebih komprehensif. Sehingga bidang kajian komunikasi politik menjadi sangat luas, karena studi dan pendekatan tradisional maupun kontemporer masuk di dalamnya dan saling melengkapi. Sebagai studi baru, komunikasi politik dengan dilengkapi teori-teori maupun metodologi. Sebagai contoh antropologi dan sosiologi digunakan untuk memahami linguistik dan simbolisme dalam politik, termasuk pula kajian semiotik dan discourse hingga cultural studies.

Michael Rush dan Philip Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik menurut Maswadi Rauf (1993) berarti kegiatan politik

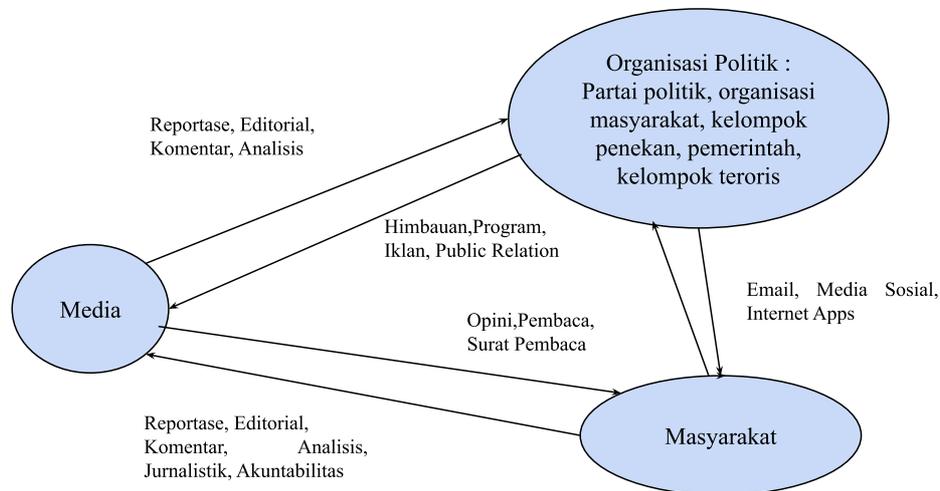
penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Komunikasi politik menyampaikan pesan-pesan politik berupa permintaan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) sistem politik dan hasil dari pengolahan tersebut dialirkan melalui komunikasi politik (Wardhani, 2015).

Dalam menjalankan fungsinya, komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari media sebagai sarana perantara, penghubung, dan pengendalian kegiatan suatu sistem politik dan melalui media komunikasi politik, orang tua, sekolah, pemuka agama dan tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai ke dalam masyarakat. Para pemimpin partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai kehendak mereka serta memberi rekomendasi dalam membuat kebijakan. Setelah informasi diterima, mereka yang berada di legislatif membuat undang-undang yang sesuai kebutuhan kemudian dikomunikasikan pada eksekutif untuk dapat dilaksanakan selanjutnya dikomunikasikan pada masyarakat agar dapat memberi penilaian pada pengimplementasiannya (Wardhani, 2015).

Komunikasi politik adalah *purposeful communication about politics* yang mengidentifikasi komunikasi politik sebagai: (1) Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. (2) Komunikasi yang ditujukan pada aktor-aktor politik oleh golongan non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. (3) Komunikasi tentang politisi dan aktivitasnya seperti yang terdapat di laporan berita dan editorial media massa serta bentuk-bentuk diskusi lain tentang politik (Brian McNair, 2003: 3). Komunikasi politik digiatkan oleh para politisi, profesional, dan aktivis dengan menggunakan berbagai simbol dan kode. Simbol dan kode tersebut diformulasi dalam konteks interaksi di antara para elit dan publik. Mereka menandai (encoding) kepentingan dan tuntutan politik dalam konteks budaya yang beragam dan berlapis. Agar tuntutan dan kepentingan politik dapat diartikulasikan

dengan baik dan mendapat penerimaan secara tepat (decoding), dibutuhkan akumulasi kode yang dapat menerjemahkan makna pesan yang dimaksudkan. Praktek komunikasi politik tidak saja mengandalkan model formal bahasa dengan model terukur, tetapi juga dengan kode-kode kultural lainnya yang lebih cair. Pesan-pesan politik disampaikan elit kepada publik atau sebaliknya dapat dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media massa. Pesan-pesan politik melalui media massa, adalah pesan-pesan yang sudah dikonstruksi oleh lembaga media bersangkutan, sehingga berpotensi dimanipulasi. Pesan-pesan politik tersebut diterima oleh elit atau publik sebagai kerangka referensi pengetahuan mereka. Pada tingkat publik, pesan-pesan tersebut menjadi dasar penting bagi sosialisasi politik. Pada tingkat elit, pesan-pesan tersebut dapat dijadikan bahan baku yang penting bagi perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, media massa dituntut untuk menyalurkan pesan-pesan politik secara substantif dalam rangka memainkan fungsinya pada mekanisme komunikasi politik.

McNair mengidentifikasi fungsi media massa dalam komunikasi politik, yakni: (1) Memberi informasi kepada masyarakat mengenai kejadian di sekitarnya. Media komunikasi berfungsi mengamati dan memonitoring peristiwa dalam masyarakat. (2) Memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya fakta atau kejadian dalam masyarakat. (3) Media berfungsi sebagai wadah untuk menampung persoalan-persoalan politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan menyebarkan kembali opini tersebut kepada masyarakat. (4) Mempublikasikan isu-isu publik kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Media dapat berfungsi sebagai *watchdog* dalam masyarakat. (5) Media sebagai saluran advokasi bagi kebijakan publik dan program-program lembaga politik (McNair 2003: 12).



Gambar 2.1. Model Komunikasi Politik Baru McNair (2014)

Komunikasi Politik termediated Media Tradisional (McNair, 1995; 6) menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam proses komunikasi politik berinteraksi satu sama lain. Elite yang terdiri dari organisasi politik seperti partai, organisasi publik, pemerintah menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan program-program politiknya untuk disampaikan kepada pemilih (voters) yakni warga negara (citizen). Pesan tersebut biasanya dikemas oleh media tradisional dalam bentuk liputan, editorial, komentar dan analisis berita untuk disampaikan kepada publik. Disisi lain media juga memfasilitasi warga (citizen) untuk menyampaikan opini mereka untuk kepada elite. Dalam praktiknya komunikasi politik yang dimediasi media tradisional ini memungkinkan terjadinya hambatan (barrier) berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi politik. Mereka yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium (channel). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya.

2.2.4 Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram pada dasarnya memang merupakan sarana mempertunjukkan sesuatu, maka dari itu kemunculan efek dibalik sarana ini memunculkan banyak hal dan kultur baru. Secara sederhana Instagram berperan sebagai sarana untuk menangkap gambar atau video, mengeditnya, lalu membagikannya kepada para pemilik akun Instagram lain. Kevin Systrom dan Mike Krieger dianggap sukses dalam menciptakan aplikasi sosial media Instagram ini (Enterprise, 2012). *Instagram is online portable sosial-organizing administration that empowers clients to take photographs and recordings and offer them on an assortment of long range interpersonal communication stages.* Jika dilihat dari pengertiannya maka Instagram merupakan suatu wadah untuk mengabadikan photo dan video kemudian membagikannya di berbagai platform jejaring sosial lainnya yang dilakukan secara online (Quesenberry, 2021).

Sama halnya dengan platform media sosial lainnya, Instagram juga memiliki beberapa fitur menarik. Namun ada juga beberapa fitur menarik Instagram yang membedakannya dengan media sosial lainnya, yaitu (Saleh et al., 2020):

- a. Followers, menjalin hubungan dengan menjadi pengikut maupun diikuti oleh orang lain dalam media sosial instagram.
- b. Upload photo, sarana dalam meng-upload photo maupun video serta saling berbagi dengan orang lain dalam instagram merupakan keutamaan dari Instagram.
- c. Filter, suatu hal yang membedakan Instagram dengan media sosial lainnya adalah adanya filter atau efek photo dan video di dalamnya untuk mempermanis photo atau video yang di upload.
- d. Caption, foto maupun video yang telah di upload dapat diberikan keterangan mengenai photo atau video tersebut maupun tempat dimana photo atau video tersebut diambil.

- e. Like, seperti halnya Facebook yang memiliki fitur like. Instagram juga memiliki fitur ini yang dapat digunakan oleh pemilik akun agar dirinya mengetahui berapa dan siapa saja orang yang menyukai unggahan photo atau videonya. Semakin banyak jumlah like pada suatu photo maka photo tersebut akan menjadi semakin populer di kalangan pengguna Instagram lainnya.
- f. Explore, berbagai photo dan video populer akan masuk dan mudah ditemukan di halaman explore. Jika suatu photo atau video masuk ke dalam halaman tersebut, maka hal tersebut akan memudahkan pengguna lain untuk ikut menyaksikan photo atau video yang populer tersebut. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan followers pada pemilik akun tersebut.

Ada beberapa kelebihan dari Instagram yang membuatnya menjadi menarik untuk para penggunanya. Menurut (Enterprise, 2012) kelebihan tersebut, yaitu:

- a. Instagram merupakan aplikasi yang didistribusikan secara gratis
- b. Tampilan photo yang di upload akan menjadi semakin menarik dan estetik serta tidak membosankan dengan menggunakan fitur edit photo yang disediakan oleh pihak Instagram.
- c. Instagram mampu menjadikan seseorang menjadi sangat kreatif dalam menghasilkan photo atau video yang tidak biasa bahkan cenderung unik atau sering disebut instagramable. Hal ini dapat menjadikannya si pengguna menjadi populer sehingga memiliki followers yang tidak sedikit. Komunitas yang memiliki minat yang sama juga dapat lebih mudah dalam menjalin koneksi pertemanan.

Instagram sangat fokus pada tujuannya untuk menjadi mediator komunikasi melalui gambar atau foto. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memaksimalkan 21 fitur kamera pada gadgetnya dengan maksimal. Pengguna hanya tinggal melakukan pemotretan, melakukan koneksi dengan aplikasi ini dan mengedit bila perlu untuk kemudian diupload ke server Instagram. Foto yang telah dibagikan akan otomatis di share kepada followers sekaligus server pusat. Setiap orang dapat "berkomunikasi" dengan foto. Ini adalah bentuk komunikasi yang baru dimana komunikasi tidak lagi berupa verbal tapi

juga dalam bentuk gambar. Komunikasi di era *cyber* merupakan komunikasi yang berdasar pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap simbol-simbol yang berkeliaran di dalamnya.

2.2.5 Media Richness Theory

Media Richness Theory (Teori Kekayaan Media) dikemukakan oleh Daft dan Lengel (1986), dimana mereka mengklasifikasikan media komunikasi berdasarkan kemampuan media untuk mengelola informasi yang kaya, pasti dan jelas. Teori ini mencoba mengidentifikasi apakah media yang paling tepat dalam situasi komunikasi tertentu. Klasifikasi ini dengan mempertimbangkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pesan yang diterima akibat penggunaan media tertentu. Media terkaya adalah media yang mampu memberikan umpan balik langsung dan menyampaikan banyak isyarat dalam bentuk bahasa alami. Semakin tinggi kekayaan media semakin banyak informasi yang diberikan dan semakin sedikit ketidakjelasan didalamnya, sehingga akan mengurangi ketidakpastian dan tingkat ambiguitas penerima informasi (Daft, et al 1987). Dalam teori kekayaan media isi pesan dapat menjadi jelas atau samar tergantung pada kekayaan medianya. Kekayaan media menggunakan empat faktor untuk mengevaluasi kekayaannya, sebagai berikut :

1. Kecepatan menghantarkan umpan balik (*The speed of feedback*), sebuah komunikasi dikatakan lengkap ketika feedback dapat segera diperoleh. Adanya feedback mengindikasikan bahwa sebuah pesan diterima dengan baik. Feedback memastikan bahwa setiap kesalahan dalam transmisi dapat segera dikoreksi. Kecepatan umpan balik dalam sebuah medium merujuk pada kemampuan medium tersebut untuk mengizinkan pengguna memberikan respon yang cepat pada saat komunikasi diterima. Medium yang digunakan seharusnya dapat mensupport komunikasi dua arah.
2. Kapasitas untuk menghantarkan berbagai simbol (*The capacity to carry multiple cues*), Terdapat beberapa cara medium komunikasi untuk dapat dicapai dan isyarat itu berupa audio dan visual. Sebagai contoh, iklan kampanye stop merokok dapat dikomunikasikan dengan kombinasi beberapa isyarat.

3. Kemampuan penggunaan bahasa sealam bahasa aslinya (*The ability to use natural language*), Variasi penggunaan bahasa yang dimaksud adalah banyaknya makna yang dapat disampaikan melalui simbol bahasa yang digunakan. Sebuah medium dikatakan memiliki kekayaan yang lebih jika memiliki sejumlah besar kriteria. Merujuk hal ini, berarti media dapat peringkat berdasarkan urutan menurun berdasarkan kekayaannya.
4. Kemampuan media mengantarkan perasaan personal (*The degree of personal focus*), kemampuan media untuk dapat menghantarkan perasaan personal dan emosi-emosi dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Setiap media memiliki tingkatan yang berbeda soal fokus pribadi, khususnya ketika sebuah media menggabungkan perasaan pribadi dan emosi, maka pesan akan tersampaikan dengan baik.

Media Richness Theory ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana media dan komunikasi berkontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam tentang fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, teori ini digunakan untuk menggali kekayaan komunikasi dalam berbagai media dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Teori ini berasumsi bahwa jika tingkat kerancuan pesan dalam organisasi cukup tinggi, kita harus memilih jenis media komunikasi yang sesuai dengan hal tersebut. Beberapa ahli mengatakan bahwa kekayaan media merupakan sebuah dimensi yang subjektif (Lievrouw & Livingstone, 2006:120).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian kualitatif bermaksud untuk menemukan hakikat realitas atau ilmu pengetahuan yang berkembang. Para peneliti sosial berpendapat bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu sains, kita dapat mampu mempelajari dunia sosial. Pengetahuan yang baru dan berharga bisa didapatkan melalui observasi yang teliti dan sistematis mengenai dunia sosial serta dikombinasikan dengan pemikiran yang logis dan cermat (Neuman, 2014). Sebuah penelitian kualitatif memiliki empat paradigma ilmu pengetahuan yang menjadi dasar penelitian yaitu diantaranya, paradigma positivisme, post positivisme (yang lebih dikenal sebagai *Classical Paradigm* atau *Conventionalism Paradigm*), paradigma kritis (realisme) dan paradigma konstruktivisme.

Paradigma yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Paradigma Interpretatif adalah salah satu paradigma non positivisme. Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsuf Jerman yang memfokuskan penelitian pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial. Cara pandang yang digunakan milik kaum nominalis ini yang melihat realitas sosial adalah sesuatu yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas serta tidak ada sesuatu yang nyata. Hakikat interpretatif ini menganggap individu melihat dan membangun realitas sosial secara aktif dan sadar, sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda pada suatu peristiwa, dengan kata lain realitas sosial adalah hasil bentukan dari serangkaian interaksi antar pelaku sosial dalam sebuah lingkungan. Dalam paradigma interpretatif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami (*to understand*) suatu peristiwa. Paradigma interpretatif menjadi pedoman dasar untuk penelitian ini. Interpretatif mengacu pada kategori-kategori keilmuan sosial berupa komunikasi, sosiologi, antropologi, pendidikan, studi kultur, ilmu politik, sejarah dan humanis (Littlejohn & Foss, 2018).

Tujuan dari interpretif adalah memahami suatu peristiwa atau tanda-tanda dari suatu peristiwa. Paradigma ini cocok digunakan bagi mereka yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memiliki ketertarikan mengenai bagaimana sebuah komunitas, kultur, atau individu membuat makna dari serangkaian aksi dan interaksi yang mereka lakukan;
2. Menginterpretasikan makna berdasarkan aspek historis, geografis, politik, linguistik, ideologi, ekonomi dan budaya;
3. Menginterpretasikan teks, kode dan aturan-aturan
4. Mengeksplorasi makna dan interpretasi dari dalam diri masing-masing peneliti.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan metode analisis isi (content analysis) bersifat deskriptif. Analisis isi adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan dokumen untuk diteliti. Adapun dokumen yang diteliti dapat berbentuk teks, simbol, gambar, video dan lain sebagainya. Dokumen pada metode analisis isi dapat dikatakan sebagai bentuk dari representasi simbol yang dapat disimpan atau didokumentasikan yang dapat dianalisis. Analisis isi kualitatif mengarah pada suatu metode analisis integratif dan secara konsep digunakan untuk menemukan dan mengidentifikasi serta mengolah dan menganalisa dokumen yang bertujuan untuk memahami pemaknaan serta signifikansi dan relevansi (Bungin, 2011:203).

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Definisi lain dari analisis isi yang sering digunakan adalah: *research technique for the*

objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu, biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya (Barelson, 1952).

Menurut pernyataan Krippendorff, analisis isi merupakan sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Krippendorff tidak membatasi teks di dalam definisinya tersebut sebagai sebatas produk tulisan, namun juga "*other meaningful matter*", yaitu produk yang memiliki makna lainnya seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun simbol. (Rumata, 2017).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono 2017:207). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan media sosial instagram sebagai media yang diteliti dan bagaimana bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya dan bagaimana tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagramnya.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan laman instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan username @bawaslukotabandarlampung, yang dimana lokasi kantor terletak di Jl. Way Besai, Pahoman, Kota Bandar Lampung.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus komponen yang diteliti. Setiap unit akan dianalisis, digambarkan, atau dijelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan secara deskriptif (Kriyantono, 2020). Unit analisis pada penelitian ini terdiri dari konten, teks, caption foto, tagar, kondisi sosial serta konteks pada konten di instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung. Unit analisis data diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta pengambilan kesimpulan atau hasil dari penelitian.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010). Secara sederhana peneliti dapat menjelaskan bahwa sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terhadap data yang dibutuhkan peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer yang diperoleh dari unggahan akun media sosial instagram @bawaslukotabandarlampung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui artikel, jurnal dan referensi-referensi lainnya.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendukung analisis pada penelitian ini (kriyantono : 2020). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut (Iskandar, 2009). Analisis dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa unggahan pada akun instagram @bawaslukotabandarlampung.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel resensi guna mencari pijakan teoritis terhadap penelitian dan landasan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan pada penelitian ini bersumber dari buku-buku, tesis, artikel jurnal yang berhubungan dengan analisis pesan-pesan komunikasi politik dalam media.

3.8 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai atau tampak dengan jelas karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dimana metode ini sering digunakan untuk melakukan analisis terhadap pesan-pesan pada suatu media atau isi komunikasi yang tersirat (*latent*). Analisis isi (Content Analysis) adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan kejelasan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011). Menurut Rachmat Kriyantono, analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan (teks, simbol, gambar dan sebagainya) adalah produk sosial dan budaya masyarakat.

Metode analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi adalah sebuah metode non reaktif. Maksud non reaktif adalah tidak melibatkan reaksi subyek, karena metode analisis isi digunakan untuk meneliti objek tidak hidup, seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, hasil rekaman, pidato, buku, dan film (Krippendorff, 1991). Dengan sifatnya yang non reaktif akan menghindari dari hal-hal yang bersifat subyektif (pengaruh emosional) atau yang direayasa.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan coding untuk menggambarkan inti makna dari berbagai macam tema-tema dan pesan-pesan yang muncul, fungsi-fungsi serta bentuk-bentuk visual pada akun instagram @bawaslukotabandarlampung. Coding merupakan suatu gambaran yang nyata dari analisis isi kualitatif. Selain itu, pada penelitian ini, coding juga digunakan untuk mengurangi dan merangkum makna tersebut agar dapat memudahkan untuk menjawab pernyataan penelitian (Schreier, 2012). Coding dalam analisis kualitatif digunakan secara konduktif, untuk membangun sebuah data baru dari kategorisasi yang sudah ada dan untuk memperlihatkan suatu gambaran dari penelitian secara menyeluruh dari peneliti (James, 2016). Coding induktif dapat membantu perkembangan dari kategori dan temuan baru dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Pertama-tama peneliti akan menggambarkan kategori tema, fungsi dan bentuk pesan dari konten-konten visual yang sudah ada. Tahapan kedua, peneliti akan mengidentifikasi kategori tema, fungsi, dan bentuk pesan yang relevan kemudian dapat mendeskripsikannya. Dalam melakukan coding peneliti harus menggambarkan apa yang telah dipelajari serta maksud dari penelitian harus menggambarkan apa yang telah dipelajari dari maksud penelitian tersebut. Maka saat mengelompokan kategori, proses coding harus relevan mendekati data aslinya (James, 2016, hal. 88-89). Menurut Bengtsson, terdapat proses dimana peneliti dimudahkan untuk pencarian (*meaning unit*) untuk pengambilan intinya. Sama dengan proses mengkodekan. Di tahap pertama yaitu pengkodean, dimana kode-kode tersebut akan memberikan fasilitas berupa disusunnya dari pola atau makna dari isi-isi konten dalam pembahasan mengenai tema, fungsi, dan bentuk pesan dari feeds Bawaslu Kota Bandar Lampung di Instagram yaitu @bawaslukotabandarlampung terkait pemilu. Di tahap kedua, peneliti akan melakukan mengkategorisasikan konten setiap bulannya, dari bulan Januari – Juli 2023 dan mengidentifikasi tema, fungsi, dan bentuk pesannya.

Makna	Intisari	Kode	Kategorisasi
<i>(Visual, Time, Video)</i>	<i>(Visual, Description And Video)</i>	<i>(Words Description)</i>	<i>(Pengelompokan Kategori)</i>

Tabel 1.3 Tabel Analisis

Penjelasan tabel di atas merupakan salah satu proses peneliti dalam menggunakan coding induktif pada data. Dalam proses pengkodean tersebut peneliti melakukan identifikasi pada kategori setiap bulan yang terdiri dari tema, fungsi, dan bentuk pesan inti dan menggunakan kategori tersebut sebagai judul laporan. Tahap kedua setiap tema, fungsi, dan bentuk pesan yang ditafsirkan dalam ringkasan dan diilustrasikan dengan menggunakan kutipan yang menggambarkan gagasan atau pandangan asli. Dengan ini akan menjelaskan bagaimana kategori tema, fungsi, dan bentuk pesan periode Januari – Juli 2023 akan dikembangkan dan memperlihatkan kategori yang membahas keseluruhan pertanyaan penelitian ini. Oleh karena itu, metode analisis isi kualitatif mampu menjabarkan secara luas dari hasil coding induktif yang dilakukan, sehingga diharapkan masalah penelitian terkait kategori tema, fungsi, dan bentuk pesan periode bulan Januari – Juli 2023 dapat dijabarkan secara luas, sehingga mengetahui bentuk komunikasi politik yang terdapat pada akun instagram @bawaslukotabandarlampung.

Berikut merupakan kategorisasi yang menjadi rujukan indikator untuk melihat tema pesan komunikasi politik, fungsi komunikasi politik dan bentuk penyampaian pesan komunikasi politik.

No	Visual/ Konten	Teks	Waktu	Bentuk konten	Umpan Balik (Like dan Coment)	Tema Pesan	Fungsi Pesan	Kode
01	Unggahan yang berisi kegiatan pengawasan dan kebijakan dalam	Pesan yang terdapat dalam unggahan	Waktu konten di unggah	Bentuk konten yang diunggah (gambar, carousel/ video)	Berisi respon atau jumlah like dan komentar pada unggahan	Pengawasan Pemilu	Fungsi Pesan berisi Pesan yang bersifat informatif atau edukatif.	PP01

	pengawasan							
02	Pesan yang menginformasikan terkait pemilihan umum	Pesan yang terdapat dalam unggahan	Waktu konten di unggah	Bentuk visual/konten yang diunggah (gambar, carousel/video)	Berisi respon atau jumlah like dan komentar pada unggahan	Informasi Pemilu	Fungsi Pesan berisi Pesan yang bersifat informatif atau edukatif.	IP01
03	Unggahan yang menonjolkan pentingnya wawasan dan pengetahuan tentang pemilu	Pesan yang terdapat dalam unggahan	Waktu konten di unggah	Bentuk visual/konten yang diunggah (gambar, carousel/video)	Berisi respon atau jumlah like dan komentar pada unggahan	Edukasi Pemilu	Fungsi Pesan berisi Pesan yang bersifat informatif atau edukatif.	EP01

Tabel. 1.4 Tabel Kategorisasi

3.9 Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data dan triangulasi teori. Moleong (2011) menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Teknik triangulasi ini juga digunakan peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama (Pawito, 2008).

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi teori. Menurut Patton (2002), triangulasi dengan menggunakan data maksudnya adalah mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kemudian, Patton mengatakan bahwa penelitian ini juga berusaha untuk memenuhi empat kriteria kualitas atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan media sosial untuk publikasi dengan membuat rilisan dan publikasi kegiatan serta hasil pengawasan dalam bentuk infografis dan video di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya yang dianggap sebagai media yang mampu menyebarkan pesan-pesan komunikasi politik. Dalam analisis pada akun instagram @bawaslukotabandarlampung, ditemukan unggahan-unggahan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang berisikan pesan-pesan komunikasi politik yang proses penyampaian informasi politik Bawaslu tersebut di Instagram melalui tahapan reportase, editorial, komentar, analisis, jurnalistik dan akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil dalam menyusun, menganalisis, dan menyajikan informasi politik kepada masyarakat melalui platform media sosial tersebut.

Bawaslu Kota Bandar Lampung melalui akun @bawaslukotabandarlampung mengklasifikasikan pesan-pesan politiknya dalam beberapa tema sentral yang digunakan yaitu tema pesan pengawasan pemilu, informasi pemilu dan pendidikan pemilu yang ditampilkan dalam postingan feeds instagram tersebut. Komunikasi politik dalam akun @bawaslukotabandarlampung menyediakan informasi secara berkala, dengan menggunakan fitur-fitur instagram. Dalam penggunaan *feeds instagram*, penyebaran konten informasi dilakukan secara berkala dengan informasi yang beragam dan mengunggah konten mengikuti content planning yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penyampaian pesan politiknya, akun @bawaslukotabandarlampung tersebut mempunyai beberapa pendekatan yang telah dilakukan, seperti memiliki konten yang diunggah berulang hampir pada semua kontennya. Seperti konten kegiatan pengawasan, informasi pemilu dan pendidikan pemilu yang memiliki frekuensi postingan konten yang sering berulang diunggah.

5.2 Saran

Temuan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana yang penting untuk penyelenggara pemilu secara aktif memanfaatkan teknologi dalam membantu tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu serta memberdayakan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu penyelenggara pemilu mengurangi gap informasi yang terjadi di masyarakat terkait dengan kepemiluan menggunakan media sosial khususnya Instagram. Sementara secara khusus, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pembandingan bagi pengelola akun Instagram sejenis dalam penyampaian komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Moertopo, 1982. Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. CSIS.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, J. 2018. Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, 1–20.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group. Jakarta.
- Cangara, Hafidz. (2005). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dr. Rulli Nasrullah, M. Si, 2014 , Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia), Jakarta : Prenada Media Group. Dhifa Nabila, 2020, Peradaban
- Daft, R. & R. Lengel. 1986. “Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design”. Management Science.
- Effendy, Onong Uchjana, 2015. Ilmu, Komunikasi Teori dan Praktek Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fazlur Rahman Jurdi, 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenada Media Group, cet. ke-1, hlm. 3.
- Hamna, D. M, 2018. Konvergensi Media Terhadap Kinerja Jurnalis (Studi Kasus: Fajar Tv Dan Fajar Fm). Jurnal Dakwah Tabligh, h. 58-83.
- Hendri Pondia, 2004, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Jakarta: Erlangga.
- Kriyantono. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. (2009). Teori Komunikasi, (Edisi 9). Jakarta: Salemba Humanika
- Polancik, G. (2009) Empirical Research Method Poster. Jakarta:
- Prihatmoko, J. Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I.
- Mamik. 2015. Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- McLuhan, M., & Fiore, Q 2001. The Medium is the Message. California: Giko Press.
- Meyer, Thomas. 2002. Media Democracy, How The Media Colonize Politics, London: Polity Press.

- Moh. Mahfud MD, 2009. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
- Morissan, 2005. Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Manullang, 2008. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Moleong.L, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 157
- Michael Rush & Philip Althoff. 1997. Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.
- Nurudin. 2017. Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neuman, W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition. Assex: Pearson Education Limited.
- Pawito. 2008. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta. Pelangi Aksara.
- Supranto, J. 2011. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar, Cetakan keempat, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sodikin, 2014 Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan), Bekasi: Gramata Publishing, h. 46-47.
- Saleh, 2017. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta : Sinar Grafika,h. 34.
- Saleh, et al., 2020. Model-model Komunikasi Kreatif di Era Industri. Malang: Inteligencia Media.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P, 2003. Teori & praktek kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, Ismail, 2009. Corporate Social Responsibility from Charity to Jakarta : Sustainability. Salemba Empat.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Romli, Khomsahrial. 2016. Komunikasi Massa. Jakarta: PT Grasindo
- Topo Santoso, 2019. Pemilu Di Indonesia. Jakarta Timur. Sinar Grafika. h.19.
- Andrean, Yohanes. 2022. Komunikasi Politik Di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram Mengenai Program Pengendalian Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Volume 26, Nomor 2.

- Berlian, Fiqri. 2023. Peranan Media Digital Sebagai Bentuk Pendidikan Politik Masyarakat Kota Serang (Studi Deskriptif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang). *Journal Of Civic Education*. Volume 6, Nomor 1.
- Ikhsan, M. 2019. Penerapan Electronic Government Dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Actor Network Theory pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018). Tesis. Lampung: Universitas Lampung.
- Nurman Akhmad, 2015. Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU.No 8 Tahun 2012), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, h. 36.
- Mahpudin, Mahpudin. 2019. Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*. 1. 157.
- Mulkan, Komunikasi Politik Kepala Daerah di Media Sosial (Studi pada Akun Facebook Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo), *Jurnal Potret Pemikiran*. Volume 26, Nomor 2.
- Prita, Dwiana. 2020. Teori Kekayaan Media Dalam Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Komunikasi Pejabat Publik: Studi Kasus Gerakan Blokir Akun Twitter Juru Bicara Presiden. *Jurnal Communicology*. Volume 8, Nomor 2.
- Veri Junaidi. 2009. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3.
- Wardhani, Andy Corry. 2015. Media Sosial Untuk Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 6, Nomor 2, hlm. 113-190.